



KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Hikmatul Fajri Mulya, Guntur Eko Saputro, Suwito

Jurusan Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Kebijakan Perdagangan Internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada saat ini di era globalisasi, perdagangan internasional menjadi pintu kemajuan ekonomi di dunia. Hal ini menjadi salah satu faktor terbesar dalam pembangunan ekonomi. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi menjadi tujuan utama setiap negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara-negara di dunia mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui perdagangan dan kerjasama dengan negara lainnya. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Perdagangan menurut Evenett (2019) bentuk proteksi kebijakan perdagangan internasional dapat berupa (1) Kebijakan tarif, (2) Kuota, (3) Larangan impor, (4) Subsidi, dan (5) Dumping. Tujuan penelitian untuk menjelaskan tentang pentingnya kebijakan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian dengan metode studi literatur yang melibatkan analisis dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Hasil yang dicapai bahwa kebijakan perdagangan internasional merupakan aturan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur aliran barang dan jasa antar negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat memberikan masukan pemerintah tentang pentingnya kebijakan perdagangan internasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat ini terutama dari subsidi pemerintah terhadap UMKM dapat ditingkatkan lagi dan di fasilitasi dalam mengembangkan industrinya untuk memperluas pasar.

Kata Kunci: Kebijakan, Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional merupakan aktivitas tukar menukar yang dilangsungkan oleh negara satu dengan negara lainnya atas legalitas persetujuan bersama. Selain itu perdagangan Internasional pun turut memajukan industrialisasi yang lebih maju, perkembangan transportasi, globalisasi dan presensi corporate multinasional. Jadi tidak bisa dipungkiri jika Perdagangan Internasional merupakan aspek yang sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Mikhral Rinaldi (2017), dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mencapai tahap pertumbuhan ekonomi dan mencontohkan tahap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui perdagangan internasional (Suhardi & dkk, 2023).

Czinkota berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan modal yang melintasi batas negara, sebagaimana dikutip oleh Asdi Aulia (Asdi Aulia, 2008). Ekspor berarti menjual atau mengirimkan barang atau jasa ke luar negeri dan impor berarti membeli dan menerima barang dan jasa dari luar negeri. Menurut Ibrahim (2017), saat ini setiap negara yang terlibat dalam hubungan perdagangan internasional memiliki ketergantungan satu sama lain. Bahkan Ibrahim mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini, negara-negara harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Firdaus, 2022).

David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut *Theory of Comparative Advantage* (Teori Keunggulan Komparatif). Menurut David Ricardo keunggulan komparatif adalah jika sebuah negara dapat memproduksi

barang atau jasa dengan efisien dan dengan harga yang lebih murah dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, sebagai negara produsen komputer, Korea Selatan dan Indonesia dapat memproduksi komputer dengan harga yang lebih murah daripada Indonesia, sehingga Indonesia akan lebih untung jika mengimpor komputer dari Korea Selatan (Amanda & Aslami, 2022).

Pembatasan ekspor dapat membantu kenaikan harga sewa produsen di dalam dan luar negeri. Secara khusus, perubahan dalam substitusi yang disebabkan oleh peningkatan ekspor dapat membuat kendala yang awalnya tidak terduga menjadi sukarela, berdasarkan hubungan yang menghubungkan struktur pasar dalam negeri dan luar negeri serta substitusi barang asing dan dalam negeri yang konsumsi dalam negeri (Hillman & Ursprung, 1988).

Sedyaningrum (2016) berpendapat bahwa meningkatnya impor dapat menyebabkan penurunan produksi dalam negeri, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, dan penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya, peningkatan jumlah ekspor akan menyebabkan peningkatan permintaan mata uang domestik, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tukar, yang pada gilirannya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain impor modal dan investasi, penurunan produksi domestik, peningkatan pengangguran, dan penurunan pendapatan semuanya dapat memengaruhi daya beli masyarakat (Ilkaningtyas & dkk, 2024).

Menurut Sukirno (2004), semua negara di dunia melakukan perdagangan internasional karena beberapa alasan. Faktor-faktor ini yang paling penting adalah sebagai berikut: (1) mendapatkan produk yang tidak dapat diproduksi di

dalam negeri; (2) mengimpor teknologi yang lebih canggih dari negara lain; (3) memperluas pasar produk dalam negeri; dan (4) memperoleh keuntungan dari spesialisasi (Ibrahim & Halkam, 2021).

Salah satu indikator yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk menilai dan mengevaluasi kondisi pembangunan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi; ini adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara bertahap menuju keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu. Peningkatan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah aktivitas perdagangan internasional (Yuni & Hutabarat, 2021).

Perdagangan antar negara terjadi ketika setiap negara menghasilkan produk yang berbeda, menciptakan permintaan dan penawaran untuk produk tersebut. Perbedaan produk (*Comparative Advantage*) dan perbedaan efisiensi produk dalam proses produksi dan distribusi adalah satu-satunya alasan perdagangan antar negara terjadi (Suhartono, 2011). Menurut Dabic (2020), karena perdagangan yang lebih terbuka, kemajuan dalam manufaktur, transportasi, dan komunikasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekarang dapat berpartisipasi dalam pasar internasional, sementara perusahaan berskala besar hanya dapat berpartisipasi dalam pasar internasional (Ariyani, 2022).

Dalam bukunya yang berjudul *Principal of Political Economy and Taxation* (1817), David Ricardo mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional melalui salah satu teorinya yang berpengaruh pada dunia ilmu ekonomi sampai saat ini yaitu, teori tentang keuntungan komparatif. Ricardo menciptakan perbedaan antara harga perdagangan dalam negeri dan

harga perdagangan internasional. Salah satu asumsi yang mendasari pemikiran Ricardo adalah sebagai berikut: (1) dua negara dan dua komoditi; (2) perdagangan bebas; (3) tenaga kerja bebas yang dapat bergerak secara bebas di dalam suatu negara tetapi tidak secara internasional; (4) biaya produksi tetap; (5) biaya transportasi nol; (6) tidak ada perkembangan teknologi; (7) teori nilai tenaga kerja; dan (8) pasar persaingan yang sempurna (Jamli & Rizaldy, 1998).

Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Menurut Salvatore (2004) di dalam *trade as engine of growth*, menyatakan bahwa perdagangan internasional yang terdiri dari ekspor dan impor, memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tambunan (2005) menyatakan Indonesia membuat kebijakan untuk mendorong ekspor pada awal 1980-an. Oleh karena itu, kebijakan tersebut memanfaatkan ekspor untuk mendorong pertumbuhan (Yolanda, 2016).

Berikut ini adalah halaman Total Ekspor Impor pada Satu Data Perdagangan Indonesia tahun 2023:

• Ekspor

*) Nilai : Juta US\$

Tahun	Total	MIGAS	NON MIGAS	Agriculture	Industry	Mining	Others
Agustus	21,997.98	1,318.79	20,679.19	389.65	16,837.79	4,768.57	1.97
Juli	20,862.23	1,226.80	19,635.42	377.49	16,187.88	4,295.10	1.75
Juni	20,601.31	1,259.69	19,341.62	358.69	15,673.38	4,568.80	0.44
Mei	21,706.83	1,308.61	20,398.22	390.65	16,011.66	5,303.76	0.76
April	19,284.08	1,258.66	18,025.41	292.43	13,483.09	5,507.96	0.60
Maret	23,415.99	1,338.23	22,077.77	377.82	16,936.38	6,101.37	0.42
Februari	21,321.28	1,186.51	20,134.76	338.01	15,751.05	5,231.63	0.59
Januari	22,323.84	1,487.95	20,835.89	374.05	16,200.79	5,748.49	0.51

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

• Impor

*) Nilai : Juta US\$

Tahun	Total	Consumption Goods	Raw Material Support	Capital Goods
Agustus	18,879.83	2,137.65	13,341.46	3,400.72
Juli	19,570.34	2,091.82	13,915.83	3,562.69
Juni	17,150.49	1,586.02	12,361.85	3,202.62
Mei	21,279.59	2,068.54	15,306.64	3,904.42
April	15,347.61	1,398.17	11,597.87	2,351.57
Maret	20,588.05	1,761.45	15,114.16	3,712.44
Februari	15,919.17	1,364.09	11,791.92	2,763.16
Januari	18,442.93	1,596.24	13,886.90	2,959.79

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023)

Dari data diatas menjelaskan bahwa banyaknya kegiatan ekspor impor yang dilakukan Indonesia dalam melengkapi kebutuhan hidup masyarakatnya. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing, oleh karena itu mereka membutuhkan negara lain untuk mencukupinya. Melalui perdagangan internasional setiap negara dapat berinteraksi dengan negara lain untuk mencukupi kebutuhan dan menumbuhkan ekonominya.

Perdagangan internasional pada saat ini menjadi salah satu jalan negara dalam pertumbuhan ekonominya. Kerjasama yang dilakukan diatur oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui ekspor impor barang atau jasa di bidang apapun. Perdagangan internasional tidak hanya dapat dilakukan antar negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh antar masyarakat yang berbeda negara. Interaksi antar UMKM dengan negara lain atau perusahaan asing menjadi salah satu contoh kerjasama yang tidak dilakukan langsung oleh negara.

Pada era globalisasi saat ini, memungkinkan interaksi antar masyarakat yang berbeda negara lebih

mudah untuk bertransaksi. Maka tidak menutup kemungkinan banyaknya pemasukan negara berasal dari UMKM yang melakukan perdagangan internasional diluar kegiatan pasar yang dilakukan negara. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat berpengaruh dari perdagangan internasional. Semakin banyak transaksi yang terjadi, maka semakin cepat meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Pembahasan penelitian menggunakan metode study literatur yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara dengan negara lainnya. Kelompok dalam penelitian ini ialah pemerintah, UMKM, dan lainnya yang termasuk dalam unsur negara Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Menurut Zed (2008:3), metode studi literatur adalah kumpulan tindakan yang mencakup membaca, mencatat, dan mengelolah bahan penelitian. (Kartiningrum, 2015).

Menurut Evenett (2019), pemerintah menjaga industri domestik dengan menetapkan kebijakan perdagangan internasional. Bentuk proteksi kebijakan perdagangan internasional dapat berupa kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi dan dumping (Suryanto & Kurniati, 2022). Bentuk proteksi tersebut dimulai dari (1) Kebijakan tarif, menetapkan biaya untuk barang atau jasa yang melewati batas negara agar dapat meningkatkan ekonomi, (2) Kuota, membatasi kuota produk luar negeri yang masuk agar produk dalam negeri tetap terjual dan masyarakat terhindar dari sikap konsumtif produk luar negeri. (3) Larangan impor, berguna untuk berguna untuk mencegahnya barang impor

masuk yang dapat mengganggu industri dalam negeri. (4) Subsidi, bantuan dari pemerintah terutama untuk UMKM dalam mengembangkan produksi dan pasarnya. (5) Dumping, menjual produk ke luar negeri dengan harga yang lebih murah sehingga pasar yang dijangkau lebih luas dan dapat bersaing dengan produk luar negeri dimana barang itu telah di ekspor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perdagangan internasional berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara, sehingga penetapan kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi resiko konflik dalam negeri. Banyak aspek yang dapat menjalankan perdagangan internasional, dari negara sebagai pelaku utama hingga masyarakat yang dapat berbentuk dalam individu atau kelompok. Telah banyak terlihat dimulai dari perusahaan swasta yang besar hingga UMKM juga ikut dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya ekonomi dari suatu negara jika dijalankan dengan baik.

Pendapat menurut Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati (2022: 108), indikator kebijakan perdagangan internasional tentang bentuk proteksi industri dalam negeri, yaitu: Kebijakan tarif. menetapkan biaya untuk barang atau jasa yang melewati batas negara agar dapat meningkatkan ekonomi. Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan ekonomi dengan melalui ekspor dan impor. Memanfaatkan hal ini negara dapat memperoleh pemasukan dari pajak barang atau jasa yang masuk ke dalam negeri.

Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh negara dapat menjadi salah satu solusi dalam pertumbuhan ekonomi. Barang yang masuk dari luar

negeri dikenakan pajak yang lebih tinggi agar mengurangi minat konsumen karena meningkatnya harga barang tersebut. Cara ini dapat mengurangi sifat konsumtif masyarakat terhadap barang luar negeri. Mahalnya harga barang membuat masyarakat berpikir lagi untuk membeli dan lebih mengutamakan barang dalam negeri.

Cara ini dapat mengurangi permintaan barang impor bagi pembeli dalam negeri karena harganya naik. Daya saing produk eksportir di pasar negara tujuan dikurangi oleh tarif. Tarif juga dapat menyebabkan penipuan karena praktik yang tidak adil dari produsen asing yang melakukan dumping dan melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri yang menaikkan harga pasar lebih tinggi daripada harga jual. Tarif juga dapat membantu pemerintah menghasilkan lebih banyak pajak (Priyatno & dkk., 2022).

Berkurangnya pembelian barang luar negeri membuat masyarakat lebih memilih barang dalam negeri, sehingga perputaran uang kembali ke negara. Hal ini dapat meningkatkan pemasukan bagi industri dalam negeri baik di perusahaan besar swasta maupun UMKM. Pajak yang masuk ke pemerintah dari tarif ekspor dan impor juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintah mempunyai dampak yang besar dalam meningkatkan ekonomi.

Chang (2005) berpendapat bahwa Karena negara-negara industri maju menguasai kemajuan teknologi produksi, produk impor yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah akan mendominasi pasar domestik jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan proteksi perdagangan yang terukur. Akibatnya, *Infant Industry* yang merupakan salah satu industri dalam negeri yang sedang berkembang, akan berada dalam bahaya jika kelangsungan hidup industri tersebut tidak dijamin (Anam & Solikin, 2020).

Indikator kedua menurut Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati (2022: 108), yaitu Kuota yang membatasi kuota produk luar negeri masuk agar produk dalam negeri tetap terjual dan masyarakat terhindar dari sikap konsumtif produk luar negeri. Banyaknya barang luar negeri yang masuk menjadi ancaman tersendiri bagi produk dalam negeri. Hal ini akan mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran barang luar negeri di Indonesia. Pada akhirnya akan menggusur barang-barang dalam negeri yang kalah saing dengan produk impor terutama dalam harga.

Pemberian kuota masuknya barang luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya dengan membatasi kuota barang impor yang masuk ke Indonesia dalam waktu tertentu. Hal ini juga mempunyai tujuan agar industri dalam negeri tidak terganggu oleh peredaran barang impor. Menurut Pindyck (2013), kebijakan kuota yang bertujuan untuk melindungi produsen lokal dari produk impor, merupakan penghalang perdagangan (Lesmana, 2022).

Salah satu syarat lonjakan impor adalah harus terjadi dalam waktu dekat, tiba-tiba, atau dalam jangka waktu yang tidak lama, signifikan, dan tajam, dan lonjakan tersebut harus tidak dapat diprediksi sebelumnya. Apabila lonjakan impor berlangsung lama atau hanya terjadi selama beberapa saat setelah peristiwa yang dapat diprediksi pada waktu sebelumnya terjadi, maka peristiwa tersebut tidak dapat dinyatakan. Dalam hal ini, kadaan darurat sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal XIX GATT 1994 (Raytiaputri, 2016).

Daruratnya lonjakan impor dapat mengancam industri dalam negeri terutama terjadi dalam waktu yang lama. Jika hal ini terjadi akan menyebabkan

pendapatan negara yang melalui perusahaan swasta dan UMKM akan menurun. Oleh sebab itu, pemerintah memberi pembatasan kuota untuk barang luar negeri yang masuk ke Indonesia agar tidak terjadi seperti hal tersebut. Adanya pembatasan kuota ini diharapkan dapat mengatasi lonjakan impor dan dapat memberi kesempatan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dan berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan terus meningkat.

Indikator ketiga menurut Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati (2022: 108) adalah larangan impor, berguna untuk mencegahnya barang impor masuk yang dapat mengganggu industri dalam negeri. Beberapa barang impor dapat mempengaruhi industri dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya pasar barang tersebut di Indonesia dan dapat mengancam produk dalam negeri yang dapat berefek kepada tidak lakunya produk, kalah saing dari kualitas dan harga. Oleh karena itu, ancaman yang ditimbulkan adalah meningkatnya impor produk tersebut dan menurunnya permintaan produk dalam negeri sehingga mengganggu peningkatan ekonomi negara.

Larangan impor dapat menjadi langkah penting untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman produk impor yang dapat mengganggu stabilitas pasar domestik. Dengan mencegah masuknya barang impor yang tidak sesuai dengan pasar Indonesia, produk dalam negeri memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan bersaing dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang meningkatkan kualitas produk lokal dan menjaga harga tetap kompetitif.

Namun, penting untuk diingat bahwa larangan impor harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Kebijakan yang terlalu ketat dapat

menyebabkan distorsi pasar, penurunan kualitas produk karena kurangnya persaingan, dan peningkatan harga bagi pelanggan akhir. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga industri dalam negeri adalah dengan melarang impor, namun, ini harus diterapkan dengan hati-hati dan dalam kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mencapai hasil yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Salah satunya seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yaitu, larangan impor pakaian bekas. Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas dari negara maju. Salah satu negara berkembang di dunia yang mengeksport pakaian bekas adalah Indonesia (Aditya, 2017).

Pakaian bekas yang diimpor ke dalam negeri dari negara lain disebut impor pakaian bekas. Pakaian bekas ini jauh lebih murah daripada barang baru. Apalagi saat ini sedang terjadi tren thrift dan bisnis pakaian bekas bermerek terus berkembang dari tahun ke tahun. Karena barang impor dilarang, pemasukan mereka menurun dan distributor ilegal lebih berhati-hati dalam memasarkan barang mereka. Akibatnya, para pedagang di beberapa pasar lokal mengalami dampak yang sangat besar (Fatah & dkk., 2023). Oleh karena itu, larangan impor ditetapkan oleh pemerintah Indonesia agar pasar lokal tidak dikuasai oleh barang impor yang mengakibatkan para pedagang tidak mendapatkan pemasukan. Sehingga terjadi penurunan pendapatan yang akan menimbulkan kerugian negara dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat.

Indikator keempat menurut Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati (2022: 108) adalah subsidi, bantuan dari pemerintah terutama untuk UMKM

dalam mengembangkan produksi dan pasarnya. Bantuan dalam bentuk uang atau komoditas ke pelaku ekonomi seperti yayasan, pedagang lokal, atau UMKM yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pengeluaran atau menurunkan harga agar barang produksi. Peran pemerintah sangat membantu dalam menunjang perekonomian dengan mempertahankan barang dalam negeri tetap beredar di pasar.

Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau individu dalam bentuk apa pun untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi penerima. Subsidi secara singkat berarti peningkatan atau bantuan finansial. Subsidi dapat berupa uang, materi, produk, atau keringanan biaya. Sebagian besar penerima subsidi berasal dari golongan menengah ke bawah (Soen & dkk., 2022).

Menurut Triest (2009), subsidi adalah bentuk dorongan yang diberikan oleh pemerintah kepada sebagian populasi yang memungkinkan pemerintah untuk menurunkan harga barang yang dibeli karena pemerintah membantu menurunkan biaya produksi. Tujuan subsidi adalah untuk memperbaiki mekanisme pasar dengan menyediakan layanan kepada orang miskin dan kurang sanggup dan dengan mengoreksi mekanisme kegagalan pasar dengan menghasilkan alokasi barang dan jasa yang lebih efisien. (Carolina, 2022). Oleh karena itu, pedagang atau UMKM tetap dapat memproduksi barangnya dengan harga rendah sehingga industri dalam negeri tetap berjalan.

Subsidi merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu perusahaan atau individu, terutama UMKM, meningkatkan produksi dan memperluas pasar. Subsidi dapat diberikan dalam berbagai bentuk,

seperti bantuan keuangan, bantuan materi, atau keringanan biaya, dan bertujuan untuk membantu penerima mencapai tujuan tertentu yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Subsidi juga dianggap sebagai bentuk dorongan yang diberikan oleh pemerintah untuk menurunkan harga barang yang dibeli, memungkinkan pedagang atau UMKM bersaing dengan harga yang lebih rendah. Dengan adanya subsidi, biaya produksi dapat ditekan, sehingga produk lokal dapat tetap bersaing di pasar domestik. Subsidi juga dapat meningkatkan efektivitas distribusi barang dan jasa dan memperbaiki mekanisme kegagalan pasar.

Indikator kelima menurut Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati (2022: 108) adalah dumping, menjual produk ke luar negeri dengan harga yang lebih murah sehingga pasar yang dijangkau lebih luas dan dapat bersaing dengan produk luar negeri dimana barang itu telah di ekspor. Barang yang dijual murah bertujuan untuk menguasai pasar dimana barang itu di ekspor. Persaingan ini dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dari barang-barang yang di ekspor ke luar negeri dengan barang lokal yang ada di negara lainnya. Dumping juga dimaknai dengan kebijakan diskriminasi harga yang dapat mematikan pasar luar negeri.

Menurut Hendra Halwani di dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, menurut aturan *The General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, dumping adalah ketika suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Ini dapat berupa harga yang lebih rendah dari harga jual di negara pengekspor (jika tidak ada penjual di negara tersebut) atau harga yang lebih rendah dari harga jual di negara pengimpor (setelah dikurangi biaya pengangkutan

dan biaya lain yang umum dalam perdagangan) (Anggraeni, 2015).

Berdasarkan perspektif para ekonom, Paul Krugman dan Maurice Obstfeld menyatakan bahwa diskriminasi harga dapat menjadi taktik bisnis yang sah. Selain itu, pengertian hukum dumping berbeda dari pengertian ekonomi. Karena sulit untuk membuktikan bahwa perusahaan asing membebaskan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan domestik daripada pelanggan ekspor, negara sering mencoba menghitung harga yang seharusnya wajar berdasarkan perkiraan biaya produksi luar negeri (Nugroho, 2023).

Dumping memang banyak menimbulkan asumsi yang tidak baik akan tetapi hal ini diperbolehkan. Dianggap tidak baik karena dapat menimbulkan kerusakan industri dalam negeri di negara yang dituju. Hal ini dikarenakan barang yang dijadikan dumping mempunyai harga yang lebih murah dari barang lokal itu sendiri. Cara ini lah yang menjadi salah satu penunjang ekonomi menurut pemerintah yang dapat meningkatkan perekonomian melalui barang yang di ekspor dengan harga murah.

Dumping sering dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan asumsi yang tidak baik, tetapi dalam beberapa situasi praktik ini masih diizinkan. Dumping dapat berdampak negatif terutama pada industri dalam negeri di negara-negara yang menjadi sasaran dumping karena penjualan barang dengan harga rendah dapat mengancam bisnis lokal. Namun, pemerintah melihat dumping sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi dengan mengekspor barang dengan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri tanpa melanggar aturan perdagangan internasional, penanganan kasus dumping harus dilakukan dengan hati-

hati dan berdasarkan analisis yang cermat. Upaya kolaboratif antara negara-negara untuk mengatasi dumping juga dapat menjadi langkah yang efektif untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Kebijakan perdagangan internasional merupakan aturan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur aliran barang dan jasa antar negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya melalui pasar ekspor impor. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur alur perdagangan ini agar industri dalam negeri tetap berjalan dan barang lokal tidak kalah saing dengan barang impor. Melalui pedagang lokal seperti perusahaan swasta dan UMKM dapat menunjang perekonomian negara. Oleh karena itu, produk dalam negeri harus menjadi produk utama yang beredar dan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap barang impor.

Berdasarkan penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Perdagangan menurut Evenett (2019) bentuk proteksi kebijakan perdagangan internasional dapat berupa kebijakan tarif yang memberikan tarif pajak kepada barang yang masuk sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal. Dari segi kuota bahwa membatasi barang yang masuk ke Indonesia guna untuk mengurangi sifat konsumtif masyarakat terhadap barang impor dan tetap menggunakan barang dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi negara dapat terus meningkat. Dari segi larangan impor dalam meningkatkan ekonomi berguna untuk melindungi barang dalam negeri dari banyaknya gempuran barang impor yang dapat membahayakan

industri dalam negeri dan dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Dari segi subsidi bahwa pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang atau komoditas kepada perusahaan swasta atau UMKM agar memperkecil biaya produksi sehingga barang yang di produksi bisa lebih banyak dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dari segi dumping menjadi kebijakan yang memberikan harga murah terhadap barang yang di ekspor dengan tujuan menguasai pasar dimana negara barang tersebut.

Diharapkan dapat memberikan masukan pemerintah tentang pentingnya kebijakan perdagangan internasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat menunjang perdagangan internasional itu sendiri. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat ini disarankan dari subsidi pemerintah terhadap UMKM dapat ditingkatkan lagi dan di fasilitasi dalam mengembangkan industrinya untuk memperluas pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., & Suryana, A. (2021). Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional. *Kajian*, 26(1), 2.
- Aditya, R. (2017, Oktober). Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Tembilahan). *JOM FISIP*, 4(2), 2.
- Amanda, N. S., & Aslami, N. (2022, Januari 1). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 4(1), 15.
- Anam, S., & Solikin, A. (2020). Dampak Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Proteksi dan Daya Saing Produk Baja Lapis Aluminium Seng. *Indonesian Treasury*

Review: *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 237.

Anggraeni, N. (2015, Desember). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 160-161.

Ariyani, L. (2022, Desember 1). Memetakan Kebijakan Internasionalisasi UMKM Indonesia. *Trade Policy Journal*, 1, 14.

Astuti, W. R., & Fathun, L. M. (2020, November). DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI DALAM REZIM EKONOMI G20 PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 51.

Budiarti, R. H. (2023). Manajemen Pemasaran Global Dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen dan Keberhasilan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 406.

Carolina, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Budget*, 7, 170.

Fatah, A., & dkk. (2023, Januari). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economia*, 2(1), 288 & 291.

Firdaus, A. H. (2022, Juni 1). Kebijakan Perdagangan Internasional Sektor Pertanian Agreement On Agriculture (AOA) Terhadap Undang-Undang Lingkungan. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, 4(1), 79.

Harianto, & dkk. (2013, Desember). Determinan Inovasi Teknologi dan Kebijakan Pengembangan pada Industri Pangan. *Jurnal Pangan*, 22(4), 288.

Hillman, A. L., & Ursprung, H. W. (1988, September). Domestic Politics, Foreign Interests, and International Trade Policy. *American Economic Association*, 78(4), 731. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1811171>

Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. (H. R. Ibrahim, Ed.) Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Ilkaningtyas, M., & dkk. (2024). Strategi dan Kebijakan Ekspor Impor atau Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 161.

Jamli, A., & Rizaldy, R. (1998). Kinerja Komoditas Elektronika Indonesia 1981-1995: Pendekatan Keunggulan Komparatif. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13(3), 7.

Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. 5.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Total Ekspor Impor*. Retrieved from Satudata Perdagangan: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-impor>

Kementerian Perdagangan RI. (2023, Desember 29). *Kemendag: Makanan olahan hingga perhiasan potensial jadi ekspor utama*. Retrieved Januari 13, 2024, from Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-makanan-olahan-hingga-perhiasan-potensial-jadi-ekspor-utama>

Lesmana, A. (2022, Oktober). Masalah Keagenan Dalam Kebijakan Impor Garam Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(10), 1290-1291.

Miyasto. (2014, Maret). Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 19.

Mustajab, R. (2023, Februari 06). *Cek Data Neraca Pangan Indonesia 2023, Mana yang Bakal Impor?* Retrieved Januari 13, 2024, from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/cek-data-neraca-pangan-indonesia-2023-mana-yang-bakal-impor>

Ngatikoh, S., & Faqih, A. (2020). KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR : STRATEGI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2), 178.

Nugroho, A. A. (2023, Januari). Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Anti-Dumping Di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, 1081. Retrieved from

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/2>

Priyatno, S. H., & dkk. (2022). Pengaruh Kebijakan Tarif dan Non-Tarif Negara Pengimpor Terhadap Ekspor Olahan Tuna Indonesia. *Al-Misbah*, 3(3), 314.

Raytiaputri, R. (2016, Juni). Perkecualian Terhadap Prinsip Larangan Pembatasan Kuota Impor Terkait Penanaman Modal Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 103-104.

Setiawan, A., & dkk. (2020, Oktober 07). Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Asia Tengah. *Seminar Nasional Penelitian*, 4.

Soen, A. S., & dkk. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi)*, 21(1), 84.

Sofiah, R. d. (2020, Mei). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Society (STS) As A Model of Teaching A Literature Study. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1), 4.

Suhardi, & Afrizal. (2021). KEUNGGULAN KOMPARATIF EKSPOR INDONESIA. *JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 7(1), 31.

Suhardi, A. A., & dkk. (2023, January). Peran Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Di Indonesia. *Jumek : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1, 91.

Suhartono. (2011, September). Peran Pemerintah Dan Kebijakan Perdagangan Bebas Di Provinsi Kepulauan Riau. *Kajian*, 16(3), 550.

Suryanto, & Kurniati, P. S. (2022, November 1). Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 108.

Yolanda. (2016, Februari). Analisis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 32.

Yuni, R., & Hutabarat, D. L. (2021, Maret 1). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019. *Niagawan*, 10(1), 63.